

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total serta pendapatan perkapita dengan memperhitungkan jumlah penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi di suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari adanya pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi akan memperlancar pembangunan ekonomi begitu pun sebaliknya pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sadono Sukirno pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai definisi yang berbeda. Pembangunan ekonomi mempunyai arti suatu proses perubahan menuju perbaikan yang mana proses perubahan ini dilakukan secara sadar serta terencana guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki definisi suatu proses kenaikan output yang secara terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan.

Terdapat tiga elemen dalam pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Pembangunan sebagai suatu proses yang berarti bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap warga atau negara. Setiap negara harus menjalani proses perkembangan untuk kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.
2. Pembangunan sebagai suatu usaha guna meningkatkan pendapatan perkapita karena pendapatan perkapita merupakan cerminan kesejahteraan masyarakat suatu negara.
3. Peningkatan pendapatan perkapita berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dimana suatu perkonomian bisa dikatakan berkembang apabila pendapatan perkapita meningkat.¹²

2. Konsep Efektivitas

Konsep efektivitas akan membahas beberapa bahasan, antara lain:

a. Teori Efektivitas

Secara etimologi, kata efektifitas berasal dari kata “efektif” yang mana kata efektif ini dalam bahasa Inggris adalah *effectiveness* yang mempunyai arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan di awal. Efektivitas selalu berkaitan dengan hasil sesungguhnya (hasil yang telah dicapai atau telah dilaksanakan) dengan hasil yang diharapkan.

Menurut The Liang Gie efektivitas merupakan suatu keadaan dari suatu kinerja yang dilakukan oleh manusia guna memberikan hasil yang diharapkan. Sedangkan efektivitas menurut Gibson adalah suatu

¹² Rustan, *Pusaran Pembangunan Ekonomi*, (Makassar: CV Sah Media, 2019), hal. 34

konteks perilaku dari organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan serta pengembangan.¹³

Tjokroamidjojo mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu penyelesaian suatu pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di awal yang mana hal ini berarti suatu pekerjaan bisa dinilai baik atau tidaknya tergantung dengan bagaimana cara melaksanakannya serta beberapa biaya yang telah dikeluarkan guna menyelesaikan pekerjaan tersebut. Menurut Rivanto pengertian efektivitas adalah mengenai seberapa baik pekerjaan yang telah dilaksanakan, sejauh mana orang menghasilkan suatu output yang sesuai dengan harapan. Hal ini berarti bahwa suatu pekerjaan bisa diselesaikan dengan menggunakan perencanaan baik perencanaan dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dengan begitu dapat dikatakan efektif.¹⁴ Lain halnya dengan Drucker yang mendefinisikan efektivitas adalah melakukan suatu pekerjaan dengan benar.¹⁵

Pendapat lain yaitu pendapat Robbins bahwa efektivitas merupakan suatu tingkat pencapaian dalam suatu organisasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang yang mana dalam

¹³ Makmur Kambolong dan Suriyani, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna), *Ilmu Administrasi Publik*, 2018, hal. 2

¹⁴ Sulis Setyawati, Efektivitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartangara. *eJournal Administrasi Negara*. Vol.5 No.3, 2017, hal. 6258

¹⁵ Wahyuddin, Ar Royyan Ramly, et.al, Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Vol. 16 No.2, Juli-Desember 2019, hal. 187

hal ini efektivitas merupakan suatu standar pengukuran guna menggambarkan suatu tingkat keberhasilan dari suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶ Pandangan lain dikemukakan oleh Sughandha bahwa efektivitas merupakan kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana dalam jumlah tertentu dimana kegiatan pemanfaatan ini dilakukan secara sadar yang telah ditetapkan sebelumnya guna menghasilkan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sementara Emerson mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam artian yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.¹⁷

b. Dasar Hukum Efektivitas

Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan baik dan tidak berlebihan. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 26:¹⁸

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ

تَبَذِيرًا

¹⁶ Lutfiah (ed.), *Efektivitas Organisasi Tata...*, hal. 65

¹⁷ Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), hal. 74

¹⁸ Departemen Agama RI, *Robbani: Al-Qur'an dan...*, hal. 284

Artinya:

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Kandungan dalam Surat Al-Isra' Ayat 26 tersebut menjadi bukti bahwa Islam telah mengatur sedemikian rupa sehingga hidup umat manusia bisa menjadi lebih baik yang mana dari ayat tersebut bisa dilihat juga bahwa Allah telah melarang umat manusia untuk menghambur-hamburkan hartanya. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus dilakukan tepat waktu agar tidak banyak memakan sumber daya yang telah disiapkan guna mencapai apa yang telah ditetapkan di awal.

c. Aspek-Aspek dalam Efektivitas

Musaroh menyatakan bahwa efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari suatu kegiatan atau program dapat dijelaskan dengan aspek-aspek antara lain:¹⁹

- a. Aspek tugas atau fungsi yaitu suatu lembaga atau organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi atau lembaga tersebut bisa menjalankan tugas atau fungsinya dengan baik.
- b. Aspek program atau rencana yaitu apabila suatu program atau rencana dapat dijalankan maka bisa dikatakan hal tersebut adalah efektif.

¹⁹ Setyawati, *Efektivitas Pengalokasian Dana...*, hal. 6258

- c. Aspek peraturan atau ketentuan yaitu bahwa efektivitas dari suatu program dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah ditetapkan guna menjaga berlangsungnya suatu kegiatan.
- d. Aspek kondisi ideal atau tujuan yaitu bahwa efektivitas dari suatu program bisa dilihat dari hasilnya yaitu apabila tujuan dari program yang telah direncanakan dapat tercapai.

d. Kriteria Atau Ukuran Efektivitas

Efektivitas dalam suatu organisasi bisa dilihat dari sejauh mana sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sharma memberikan kriteria dalam efektivitas yang berkenaan dengan internal dan eksternal dari suatu organisasi, yaitu:

- a. Output atau produktivitas.
- b. Keberhasilan dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada.
- c. Tidak adanya ketegangan atau konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Steers mengemukakan bahwa kriterian dalam efektivitas yaitu:

- a. Produktivitas.
- b. Kemampuan beradaptasi fleksibelitas.
- c. Kepuasan dalam kerja.²⁰

²⁰ Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan...*, hal. 76

Sedangkan Gibson menyatakan bahwasanya efektivitas dapat diukur melalui lima kriteria, yaitu:²¹

- a. Produktif yaitu kemampuan dalam menghasilkan dari program yang telah direncanakan.
- b. Efisiensi yaitu memanfaatkan sumber daya dengan minimal sebagai pendukung dalam menjalankan program yang telah direncanakan dengan hasil yang optimal.
- c. Kepuasan yaitu hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya baik secara individu maupun secara keseluruhan.
- d. Adaptasi yaitu kemampuan dalam menghadapi perubahan yang terjadi sehingga tujuan yang telah ditetapkan di awal tetap dapat tercapai.
- e. Pengembangan yaitu usaha dalam mengembangkan kegiatan agar hasil yang dicapai bisa lebih optimal.

3. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan atau yang biasa disebut dengan manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan. Dengan kata lain manajemen atau pengelolaan merupakan suatu hal yang dilakukan oleh pimpinan dari suatu organisasi guna melakukan perencanaan dalam

²¹ Yosep P. Koton, *Restrukturasi Organisasi: Teori dan Aplikasi dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 25

rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, mengorganisasikan sumber daya manusia dalam rangka melakukan rencana yang telah dibuat, mengarahkan, serta kegiatan pengawasan pada jalannya kegiatan yang telah direncanakan.²²

Koontz menekankan bahwa didalam majamen terdapat suatu seni maupun ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Seni yang dimaksud disini merupakan sutau kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran, serta kemampuan dalam menggunakan pengetahuan manajemen. Lebih lanjut lagi, Koontz menambahkan bahwa ilmu dan seni tidaklah saling bertentangan melainkan ilmu dan seni tersebut saling melengkapi. Dengan ini maka manajemen dapat dijelaskan sebagai suatu proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, dan juga kegiatan pengendalian, serta memimpin kegiatan yang dilakukan oleh anggota organisasi dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²³

b. Dasar Hukum Pengelolaan

Islam mengajarkan segala sesuatu yang harus dilakukan agar semua umat manusia bisa menjalani kehidupan bekerja dan berorganisasi dalam sebuah barisan yang teratur dan juga kokoh

²² Sadono Sukirno, et.all, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 96

²³ Muh. Kadarisman, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 5

seperti dengan apa yang telah Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an Surat Ash-Shaff Ayat 4, yaitu:²⁴

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

Artinya:

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

c. Pentingnya Pengelolaan

Pengelolaan (manajemen) sangat dibutuhkan di setiap organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta bahkan organisasi sosial pun sangat memerlukan manajemen. Hal ini dikarenakan setiap organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tujuan yang telah dicanangkan sejak awal akan berhasil apabila organisasi tersebut mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pada umumnya yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, serta mengawasi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan lain

²⁴ Departemen Agama RI, *Robbani: Al-Qur'an dan ...*, hal. 551

seperti meramal, mengambil keputusan, *staffing*, memotivasi, menganggarkan, serta kegiatan lainnya juga bisa dilakukan.²⁵

Ada empat fungsi manajemen menurut Jones dan George yang dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan yang saling berkaitan, yaitu:

Gambar 2.1
Fungsi Manajemen Menurut Jones dan George



Sumber: Jones & George dalam buku Manajemen

a. Perencanaan (*Planning*)

Seorang pemimpin dalam melakukan perencanaan harus bisa mengidentifikasi serta memilih tujuan dan arah tindakan organisasi yang tepat. Selain itu seorang pemimpin juga harus bisa

²⁵ Sutarno (*ed.*), *Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hal. 8

mengembangkan strategi guna mencapai kinerja yang lebih baik. Terdapat langkah yang berkenaan dengan proses perencanaan, yaitu:

1. Memutuskan tujuan yang akan dicapai.
2. Memutuskan strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan.
3. Memutuskan cara pengalokasian sumber daya yang akan digunakan dalam strategi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Merupakan kegiatan dalam menyusun struktur hubungan kerja yang mana dalam hal ini adalah agar anggota organisasi bisa berinteraksi serta berkerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggota organisasi ditempatkan sesuai dengan bagian dan tugasnya masing-masing sehingga bisa memberikan garis kewenangan serta tanggung jawab antar individu maupun kelompok yang berbeda. Struktur organisasi akan menentukan bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki manusia bisa bekerja dengan maksimal.

c. Memimpin (*Leading*)

Seorang pemimpin dalam memimpin organisasi mengkomunikasikan visi organisasi yang jelas yang harus bisa dicapai organisasi, mendorong serta memberdayakan anggota organisasi agar mereka memahami dengan baik peran apa yang

harus mereka jalankan demi tercapainya tujuan. Kepemimpinan tentu saja melibatkan penggunaan kekuasaan, kepribadian, pengaruh, bujukan, serta keterampilan dalam berkomunikasi mengkoordinasikan orang-orang yang ada di organisasi agar apa yang mereka lakukan bisa sejalan.

d. Mengendalikan (*Controlling*)

Hal ini berarti seorang pemimpin harus melakukan evaluasi dan yakin bahwa apa yang dilakukan oleh anggota organisasi sudah bergerak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Seorang pemimpin harus bisa mengevaluasi seberapa baik organisasi dalam mencapai tujuan dan melakukan koreksi yang diperlukan agar organisasi bisa meningkatkan kinerjanya.²⁶

4. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Pengertian dana desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Bab I Pasal 1 Ayat (21) disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

²⁶ *Ibid.*, hal. 10

pemberdayaan masyarakat desa.²⁷ Anggaran yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dihitung berdasarkan pada jumlah desa serta dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta berdasar pada tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.²⁸

b. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu tindakan pemerintah desa dalam mengurus dan menata pemerintahan yang baik dalam mengalokasikan dana desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut adalah wajib bagi pemerintah desa untuk melakukan dengan jalan musyawarah desa dimana hasil dari musyawarah desa tersebut akan dituangkan pada peraturan desa demi terciptanya kesejahteraan. Pemerintah desa hendaknya dalam pelaksanaan musyawarah desa melaksanakan prinsip pengelolaan anggaran dana desa yang meliputi transparansi, akuntabel serta partisipatif.

Kegiatan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi:²⁹

1. Perencanaan

Pengelolaan anggaran dana desa melibatkan perencanaan dalam rangka menentukan program atau tujuan yang ingin dicapai

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 Ayat (21)

²⁸ Aditya Puspa Rinanti, Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. *Skripsi*. Agustus 2019, hal. 12-13

²⁹ *Ibid.*, hal. 13-21

sehingga dalam mengelola dana desa, pemerintah desa tidak melenceng dari tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan perencanaan dalam mengelola keuangan desa adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan dimana pelaksanaan merupakan tindakan dari suatu perencanaan. Pelaksanaan keuangan desa merupakan suatu proses dimana peraturan desa yang tertuang dalam APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa baik dalam pelayanan, pembangunan ataupun pemberdayaan.

3. Penatausahaan

Kegiatan penatausahaan adalah kegiatan dimana semua kegiatan dalam pelaksanaan keuangan desa dikelola serta dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa.

4. Pelaporan

Kegiatan pelaporan adalah hasil dari penatausahaan keuangan desa yang telah dikelola dan disampaikan oleh kepala desa kepada BPD, pengawas, serta masyarakat.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kegiatan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan.

5. Pembangunan

a. Pengertian Pembangunan

Kata ‘pembangunan’ secara dinamis bisa diartikan sebagai suatu orientasi serta suatu kegiatan usaha yang tidak ada akhirnya.³⁰

Pembangunan menurut Jakob Oetama adalah usaha dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana dalam proses pembangunan terhadap unsur *heroism*, unsur konflik, unsur frustrasi, unsur romantik, serta unsur manusiawi yang mendalam.³¹ Adapun pendapat Rogers mengenai pengertian pembangunan yaitu suatu perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan sistem ekonomi yang dikehndaki oleh suatu bangsa.

W.W Rostow mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang mana proses ini bergerak dalam garis lurus yaitu dari masyarakat terbelakang menuju masyarakat negara yang maju. Lain halnya dengan Bachrawi Sanusi yang mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan dimana perubahan ini ditandai dengan

³⁰ Fhatimatuz Zehroil Batul, Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, *Skripsi*, September 2018, hal. 31

³¹ Jakob Oetama, *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hal. 280

adanya perubahan struktural, dengan kata lain bahwa pembangunan merupakan suatu keadaan fisik serta keadaan jiwa yang diusahakan oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses baik sosial, ekonomi maupun kelembagaan guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Menurut Easton pembangunan adalah usaha dalam meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Menurut Easton proses yang sistematis tersebut memiliki tiga unsur didalamnya, yaitu: *input* (bahan masukan konservasi); proses konservasi; *output* (hasil konservasi).³²

Pembangunan dalam konteks yang lebih luas mempunyai pengertian yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda, yaitu:³³

a. Pembangunan adalah Perubahan

Perubahan disini mempunyai arti mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi saat ini. Kehidupan yang lebih baik ini harus dilihat dalam keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu tidak hanya mengenai peningkatan taraf hidup saja melainkan juga dalam segi kehidupan yang lain dimana setiap segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat ini adalah saling bertalian erat.

b. Pembangunan adalah Pertumbuhan

Pertumbuhan yang dimaksud disini merupakan kemampuan suatu negara untuk selalu berkembang baik berkembang secara

³² Batul, *Efektivitas Kebijakan Dana...*, hal. 33-34

³³ Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan...*, hal. 42-47

kuantitatif maupun berkembang secara kualitatif dimana pertumbuhan ini juga mencakup keseluruhan segi kehidupan.

- c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan Keadaan yang lebih baik merupakan keadaan yang diidamkan oleh masyarakat dimana pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung. Keadaan yang lebih baik ini tentu saja tidak terjadi secara kebetulan melainkan dilakukan secara sadar dimana baik secara konseptual maupun secara operasional tujuan serta kegiatan dilakukan dengan sengaja dan ditentukan dengan seluruh potensi serta kekuatan nasional.
- d. Pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun rapi Kegiatan perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap organisasi, apapun tujuannya dan apapun kegiatannya. Negara juga merupakan sebuah bentuk dari organisasi sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan, para pemimpin atau bisa dikatakan pemerintah mau tidak mau pasti terlibat dalam pembuatan perencanaan.
- e. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan bangsa Setiap negara yang ada di dunia baik yang sudah maju maupun yang berkembang pasti menginginkan tercapainya titik jenuh absolut yang sudah tidak dapat ditingkatkan lagi, seperti:
 - a) keadilan sosial;
 - b) kemakmuran yang merata;

- c) perlakuan yang sama di mata hukum;
- d) kesejahteraan material, mental, spiritual;
- e) kebahagiaan untuk semua pihak;
- f) ketenteraman; dan
- g) keamanan.

b. Dasar Hukum Pembangunan

Pembangunan menurut pandangan Islam tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Raad Ayat 11, yang berbunyi:³⁴

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ تَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ
 اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya:

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

c. Persyaratan Dasar Pembangunan

Prof. Cairncross menyatakan bahwa pembangunan bukan sekedar kepemilikan sejumlah besar uang ataupun semata-mata fenomena

³⁴ Departemen Agama RI, *Robbani: Al-Qur'an dan ...*, hal. 250

ekonomi saja melainkan juga mencakup semua aspek perilaku masyarakat, penegakan hukum dan ketertiban, kecermatan dalam hubungan bisnis termasuk hubungan dengan instansi yang berhubungan dengan penerimaan negara hubungan antar keluarga, angka buta huruf, keakraban dengan peralatan mekanik, dan lain sebagainya. Dalam rangka itulah beberapa persyaratan dalam pembangunan harus dilakukan.³⁵

a. Atas Dasar Kekuatan Sendiri

Syarat utama dalam pembangunan adalah bahwa pertumbuhan haruslah bertumpu pada perekonomian di dalam negeri. Keinginan atau hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa guna menciptakan kemajuan material harus muncul dari warga negara itu sendiri. Pembangunan harus diprakarsai oleh negara sendiri dimana pembangunan tidak dapat dicangkokkan dari luar. Kekuatan dari luar sejatinya hanyalah sebagai rangsangan dan membantu kekuatan nasional.

b. Menghilangkan Ketidaksempurnaan Pasar

Adanya ketidaksempurnaan pasar bisa menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan. Dalam rangka menghilangkan ketidaksempurnaan pasar lembaga sosio-ekonomi harus diganti dengan yang lebih baik. Fasilitas kredit murah dan lebih luas juga harus disediakan untuk para

³⁵Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 41-56

petani, pedagang kecil, dan usahawan. Selain itu pengetahuan mengenai kesempatan pasar juga harus ditingkatkan.

c. Perubahan Struktural

Perubahan struktural mempunyai arti peralihan dari ekonomi pertanian berbasis tradisional ke ekonomi berbasis industri modern yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, serta motivasi yang ada secara radikal. Perubahan struktural bisa menciptakan kesempatan kerja semakin banyak, produktivitas buruh stok modal, pendayagunaan sumber-sumber baru serta adanya perbaikan teknologi yang semakin baik.

d. Pembentukan Modal

Faktor penting dan strategis dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Bisa dikatakan bahwa pembentukan modal merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi.

e. Kriteria Investasi yang Tepat

Negara harus menentukan besarnya tingkat investasi tetapi juga menentuka komposisi investasi yang tepat. Hal itu adalah menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat. Pola yang optimum dalam investasi sebagian besar tergantung pada iklim investasi yang tersedia di negara tersebut dan pada pada produktivitas marginal sosial dari berbagai jenis investasi

f. Persyaratan Sosio-Budaya

Pengetahuan masyarakat akan sosio-budaya harus dirubah apabila mengharapkan berjalannya pembangunan. Apabila terdapat hambatan sosial yang menghalangi kemajuan ekonomi, maka sudah semestinya untuk dihilangkan atau disesuaikan. Organisasi sosial seperti keluarga bersama, dogma agama, dan kehidupan desa harus dimodifikasi sehingga bisa selaras dengan pembangunan. Kenaikan pendapatan nasional tidak akan bisa menaikkan kesejahteraan sosial apabila adanya kenaikan pendapatan nasional itu tidak dibarengi dengan penyesuaian budaya. Karena itu perubahan dalam sosial-budaya harus dilakukan secara selektif dan bertahap dan menggunakan metode persuasif.

g. Administrasi

Tanpa adanya pemerintahan yang kuat, stabil, perdamaian dan ketentraman, kebijaksanaan publik juga tidak bisa stabil dalam artian kebijakan publik juga akan berubah-ubah. Rencana ekonomi akan mengalami kemunduran yang akan berakibat pada pembangunan yang berantakan. Oleh karena itu tanpa adanya perlengkapan administrasi yang baik dan efisien rencana publik maupun rencana privat juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Ciri-Ciri Program Pembangunan

Korten mengemukakan secara rinci mengenai ciri-ciri program pembangunan pada kebanyakan negara berkembang, antara lain:³⁶

1. Mempunyai ketergantungan terhadap organisasi-organisasi terpusat yang hanya mempunyai sedikit kemampuan dalam menanggapi keberagaman kebutuhan khas komunitas dimana ketergantungan ini juga terlihat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan “partisipatif”.
2. Investasi yang tidak memadai dalam proses pengembangan suatu komunitas guna memecahkan masalah.
3. Adanya perhatian yang kurang dalam menangani keanekaragaman masyarakat terutama dalam struktur desa yang berlapis-lapis.
4. Kurangnya integrasi antara komponen-komponen teknis dengan sosial dalam upaya pembangunan. Dalam hal ini Korten menyarankan agar pembangunan tidak hanya berdasar pada cetak biru saja melainkan diupayakan agar juga terjadi proses belajar yang akan berguna bagi masyarakat.

e. Indikator Pembangunan

Hanif Nurcholis menyebutkan beberapa indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur keberhasilan sebuah pembangunan, antara lain:³⁷

³⁶ Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan...*, hal. 72-73

³⁷ Batul, *Efektivitas Kebijakan Dana...*, hal. 38-39

a. Rata-Rata Kekayaan

Pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan dimana yang menjadi tolak ukur adalah tingkat produktivitas masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi tingkat produktivitas suatu negara secara keseluruhan. Apabila tingkat produktivitas di suatu negara tinggi maka dapat dipastikan bahwa pendapatan rata-rata dari masyarakat tinggi bahkan di negara yang bersangkutan pendapatannya akan tinggi pula. Hal ini mampu membuktikan bahwa pembangunan yang dilakukan bekerja dengan baik dikarenakan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

b. Pemerataan

Selain adanya rata-rata pendapatan yang tinggi di suatu negara tolak ukur lain yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur pembangunan yaitu adanya pemerataan kekayaan. Pemerataan ini menilai kekayaan masyarakat yang tersebar merata.

c. Kualitas Kehidupan

Moris menggunakan tolak ukur *Physical Quality of Life Index* (PQLI) dimana indikator yang digunakan dalam PQLI adalah:

- a) rata-rata harapan hidup sesudah berumur satu tahun;
- b) jumlah kematian bayi;

c) rata-rata (presentase) buta huruf.

Ketiga indikator tersebut menjadi satu bagian yang utuh yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pembangunan.

f. Pembangunan Pedesaan

Desa dalam arti sempit adalah suatu masyarakat yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani guna mencukupi kebutuhannya sendiri (swasembada). Dengan gambaran tersebut maka sebagian besar masyarakat desa adalah miskin.

Ciri penting dari penduduk di pedesaan adalah masalah kepemilikan tanah dimana tanah masih merupakan dasar dari kesejahteraan dan kekuatan politik. Dalam perspektif pembangunan, Boeke (pernah melakukan penelitian di Hindia Belanda, Jawa khususnya) menyimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia khususnya di Jawa terbagi dalam sektor tradisional dan sektor modern dimana kedua sektor ini tidak saling berhubungan. Menurut Boeke sektor tradisional perlu dirangsang melalui insentif ekonomi dan peningkatan teknologi produksi meskipun hasilnya tidak segera terlihat.

Ibrahim *et.all* berpendapat bahwa pembangunan pedesaan merupakan suatu upaya guna menyeimbangkan antara mempertahankan nilai-nilai pedesaan dan tren modernisasi. Dengan kata lain pembangunan di pedesaan adalah perbaikan dari semua segi

ekonomi dan kesejahteraan sosial, penduduk desa dan kelembagaan lingkungan.³⁸

Tabel 2.1
Aktualisasi Gagasan Pembangunan Pedesaan

Dekade	Isu Strategis
1950-an	Modernisasi, model dualism ekonomi, keterbelakangan pertanian, pembangunan komunitas, dan petani malas.
1960-an	Pendekatan transformasi, transfer teknologi, mekanisasi, penyuluhan pertanian, peranan pertumbuhan, revolusi hijau (awal), dan petani rasional.
1970-an	Redistribusi dengan pertumbuhan, kebutuhan dasar, pembangunan pertanian yang terintegrasi, kebijakan pertanian oleh negara, kredit yang distimulus oleh negara, bisa perkotaan, introduksi inovasi, revolusi hijau (lanjutan), dan pertumbuhan pedesaan yang terkait.
1980-an	Penyesuaian struktural, pasar bebas, kebijakan harga yang tepat, minimalisasi peran negara, meningkatkan peran NGOs, <i>rapid rural appraisal</i> (RRA), penelitian sistem penelitian, analisis ketahanan pangan dan kelaparan, pembangunan pedesaan sebagai proses, perempuan dalam pembangunan, dan pengentasan kemiskinan.
1990-an	Kredit mikro, <i>participatory rural appraisal</i> (PRA), pembangunan pedesaan berorientasi pelaku, analisis <i>stakeholders</i> , jarring pengaman pedesaan, gender dan pembangunan, lingkungan dan kesinambungan, serta pengurangan kemiskinan.
2000-an	Penghidupan yang berlanjut, tata kelola yang baik, desentralisasi, kritik terhadap partisipasi, pendekatan sektoral yang diperluas, perlindungan sosial, dan pemusnahan kemiskinan.

Sumber: Ellis dan Biggs, dalam buku *Konsep Ekonomi Kelembagaan: Perdesaan, Pertanian & Kedaulatan Pangan*

³⁸ Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baks, *Konsep Ekonomi Kelembagaan: Perdesaan, Pertanian & Kedaulatan Pangan*, (Malang: Empat Dua, 2015), hal. 2-4

Pemerintah telah melaksanakan beberapa program pembangunan yang ditujukan guna menaggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain:³⁹

a. PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)

Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dimana PNPM Mandiri ini terdiri dari dua jenis yaitu PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat maupun lembaga lokal, pendampingan, pelatihan, serta Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

b. Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)

Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dimana SMD ini merupakan program bantuan ternak dengan menggunakan sarjana atau dokter hewan yang mendampingi kelompok peternak sehingga program ini memberikan kegiatan pada dua pihak sekaligus yaitu meningkatkan produksi ternak dan juga memberikan kegiatan kepada para dokter hewan dan sarjana peternakan. Sedangkan program LM3 ditujukan kepada lembaga keagamaan atau organisasi sosial atau juga ormas.

³⁹ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov, 2013), hal. 166-169

c. INKA MINA

Program ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana program ini merupakan program bantuan kepada para nelayan yaitu berupa kapal nelayan.

d. KUBE (Kelompok Usaha Bersama)

Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial berupa pemberian bantuan modal usaha kepada kelompok masyarakat.

e. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (K.A.T)

Program K.A.T ini juga merupakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian sosial dimana K.A.T ini merupakan kelompok sosial-budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan pelayanan. Program yang telah dilaksanakan oleh K.A.T ini antara lain berupa pemberian bantuan pembangunan rumah, pemberian bibit tanaman, pemberian alat rumah tangga, peralatan kerja (tukang dan tani), serta uang guna biaya hidup.

f. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH ini adalah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dimana program ini dilaksanakan bersama dengan beberapa kementerian dan lembaga pemerintah seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana. Kegiatan utama PKH ini adalah pemberian uang tunai kepada keluarga atau rumah tangga yang sangat miskin.

g. Desa Siaga

Desa Siaga merupakan program dari Kementerian Kesehatan guna menyiapkan penduduk desa memiliki sumber daya serta kemampuan guna mengatasi dan mencegah berbagai masalah kesehatan, bencana, kondisi gawat dan/atau darurat kesehatan warganya secara mandiri. Program ini diselenggarakan melalui Dinas Kesehatan setempat dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas termasuk dalam dukungan pembiayaan.

g. Tujuan Pembangunan Desa

Beberapa tujuan pembangunan desa menurut Djiwandono, adalah:⁴⁰

- a. Tujuan ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas di wilayah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan.
- b. Tujuan sosial yaitu tujuan yang diarahkan guna pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Tujuan kultural, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
- d. Tujuan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat desa dengan maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil dari pembangunan.

⁴⁰ Dea Tachta Almira, Peran Dana Desa dalam Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, *Skripsi*, Juli 2018, hlm. 50-51.

Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan dalam kesempatan kerja, kesempatan berusaha serta pendapatan berdasarkan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia yang secara tidak langsung meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan pedesaan dalam jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam.⁴¹

6. Desa

a. Pengertian Desa

Desa secara etimologis berasal dari kata *dhesi* dimana kata ini berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti tanah kelahiran. Sehingga kata desa yang mempunyai arti tanah kelahiran tidak hanya menunjukkan suatu wilayah saja melainkan juga memberi gambaran kehidupan sosial, budaya, serta kegiatan penduduknya.⁴²

Definisi desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa (kata benda) merupakan suatu kesatuan wilayah dimana wilayah ini dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri yang dikepalai oleh kepala desa.⁴³ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat

⁴¹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan Edisi 2*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hal. 15-16

⁴² Icuk Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), hal. 1

⁴³ Almira, *Peran Dana Desa...*, hal. 42-43

(1) menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁴

Menurut Sutardjo Kartodikusumo desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana terdapat masyarakat yang menghuninya dan masyarakat tersebut mempunyai pemerintahan sendiri. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Landis yang menyatakan desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa yang mana penduduk tersebut mempunyai ciri-ciri:

- a. Saling mengenal.
- b. Mempunyai ikatan yang sama dalam hal kebiasaan.
- c. Mempunyai usaha dalam bidang agraris serta kehidupannya bergantung dengan faktor alam.⁴⁵

Penyebutan desa di beberapa wilayah berbeda-beda, misalnya saja *dukuh/kampong* (Jawa Barat), *gampong* (Aceh), *huta* (Tapanuli), *nagari* (Sumatera Barat), *marga* (Sumatera Selatan), *wanus* (Sulawesi Utara), *dusun dati* (Maluku)⁴⁶.

⁴⁴ Undang-Undang RI tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1)

⁴⁵ Bawono, *Panduan Penggunaan dan...*, hal. 2

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 1

b. Karakteristik Desa

Gambaran desa secara umum memiliki tiga karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

a. Sudut Pandang Sosial

Tingkat pendidikan yang menjadi salah satu indikator sosial di wilayah desa masih rendah. Keadaan seperti sangat wajar karena disamping masih mengakarnya budaya lokal yang menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan tersier tingkat pendidikan yang rendah juga disebabkan infrastruktur pendidikan yang terbatas. Mengenai infrastruktur pendidikan ini, bukan hanya bangunan sekolah saja yang terbatas melainkan juga akses menuju sekolah masih sulit. Dalam keadaan yang demikian, masyarakat yang tidak memahami betapa pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tentu saja lebih memilih untuk tidak bersekolah.

Selain tingkat pendidikan, kareakter sosial di desa juga diindikasi dengan tingkat kesehatan. Secara umum tingkat kesehatan masyarakat desa tidak dapat didasarkan pada seberapa sering masyarakat desa mengalami gangguan kesehatan. Namun dengan sedikitnya jumlah balai kesehatan menyebabkan akses penduduk desa dalam bidang kesehatan masih terbatas.

⁴⁷ Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baks, *Konsep Ekonomi Kelembagaan: Perdesaa, Pertanian & Kedaulatan Pangan*, (Malang: Empat Dua, 2015) ,hal. 7-10

Budaya Indonesia secara umum adalah menempatkan nilai-nilai positif seperti bersikap jujur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap inilah yang masyarakat desa terapkan pula dalam kehidupan sehari-hari untuk terus mengamalkan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Oleh karena itu modal sosial masyarakat desa bisa terus terjaga sampai saat ini. Sikap inilah yang seharusnya bisa menjadi modal penting dalam memberdayakan masyarakat. Dengan sudut pandang ini pencapaian dalam pembangunan desa tidak dapat dijelaskan dengan input-input materi seperti sumber daya alam, teknologi, ataupun kepadatan penduduk melainkan mempertimbangkan modal sosial sebagai aspek penting dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa seperti norma, nilai, jaringan sosial, serta distribusi pengetahuan.

b. Aspek Ekonomi

Secara keseluruhan karakter ekonomi yang ada di desa diindikasikan oleh keterbatasan infrastruktur ekonomi, sedikitnya kesempatan kerja (di luar pertanian), jauh dari pasar, serta kondisi sumber daya alam. Dari keempat indikator tersebut, tiga indikator pertama memiliki kuantitas yang terbatas di wilayah tertinggal. Kenyataan tersebut menyebabkan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga terbatas. Kenyataan itu juga

yang menyebabkan aktivitas ekonomi di wilayah desa juga sulit berkembang pesat.

Indikator terakhir yaitu Sumber Daya Alam (SDA) dimana di beberapa desa memiliki SDA yang memadai namun di beberapa desa juga memiliki keterbatasan SDA. Apabila desa memiliki sumber daya alam yang memadai maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai modal dalam mengembangkan ekonomi daerah. Namun di beberapa desa yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Secara umum pemanfaatan sumber daya alam yang tidak maksimal disebabkan ketiadaan biaya pemerintah masyarakat daerah dalam menggali potensi tersebut.

c. Aspek Budaya

Indikator atas budaya yang ada di Indonesia terdiri dari spirit wirausaha, etos kerja, serta perilaku sehari-hari. Keseluruhan indikator budaya terutama indikator spirit usaha belum tentu ada di setiap benak masyarakat desa dimana setiap manusia belum tentu memiliki jiwa wirausaha.

c. **Tipologi Desa**

Wisadirana menyatakan bahwa pola pemukiman berdasarkan tipologi masyarakat desa sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁸ Almira, *Peran Dana Desa...*, hal. 46-47

- a. Tipe masyarakat dengan pola pemukiman tersebar yaitu tipe masyarakat desa yang mencirikan adanya rumah-rumah bangunan tempat tinggal berjauhan satu sama lain.
- b. Tipe masyarakat dengan tempat pemukiman yang terkumpul dimana tipe pemukiman masyarakat ini ditandai dengan adanya bangunan rumah tempat tinggal yang terkumpul dan berjajar di sepanjang desa baik berupa jalan darat maupun jalan sungai. Tipe masyarakat terkumpul ini rumah tempat tinggal dibangun di atas lahan yang luas dimana di belakang rumah tempat tinggal terdapat sebidang tanah yang diusahakan dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian.
- c. Tipe masyarakat desa dengan pola pemukiman melingkar dimana tempat tinggal masyarakat tipe ini dicirikan dengan rumah penduduk yang berada di tepi jalan yang melingkar sehingga terlihat seperti pemukiman yang melingkar.

Sedangkan tipologi desa berdasarkan kegiatan pokoknya atau yang menonjol dibagi menjadi:⁴⁹

1. Desa Agrobisnis

Mencakup kegiatan pengolahan dan juga distribusi suplai sarana produksi pertanian, kegiatan produksi di lapangan, penyimpanan, prosesing dan distribusi komoditas pertanian.

⁴⁹ Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan...*, hal. 69-70

2. Desa Agroindustri

Meliputi kegiatan prosesing bahan-bahan hasil pertanian (hasil hutan) menjadi barang siap konsumsi atau menjadi barang setengah jadi.

3. Desa Pariwisata

Yaitu apabila desa yang berkaitan memiliki obyek wisata baik bersifat sejarah maupun karena kondisi alam.

4. Desa Industri Non-Pertanian

Meliputi industri kertas dan industri galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara.

d. Tujuan Pengaturan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I Pasal (4) menyatakan bahwa pengaturan desa memiliki tujuan sebagai berikut:⁵⁰

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;

⁵⁰ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (4)

- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
 - e. membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisiensi dan efektif, terbuka, serta tanggung jawab
 - f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
 - h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta menagatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
 - i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
- e. Otonomi Desa**

Otonomi desa oleh Widjaja diartikan sebagai otonomi yang asli, bulat, utuh, dan juga merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa memberikan gambaran dan landasan kuat untuk desa dalam mewujudkan "*Development Community*" yang mana desa tidak lagi sebagai bawahan daerah melainkan sebaliknya dimana desa sebagai "*Independent Community*"

yaitu desa serta masyarakat mempunyai hak bicara atas kepentingan masyarakat sendiri.

Desa diberi kewenangan sendiri guna mengatur desanya secara mandiri. Dengan kemandirian ini diharapkan desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi yang berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota dimana otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Menurut Taliziduhu Ndraha pengakuan otonomi di desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah sehingga rasa ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dapat berkurang.
- b. Posisi serta peran pemerintah desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga dapat mengantisipasi masa depan.

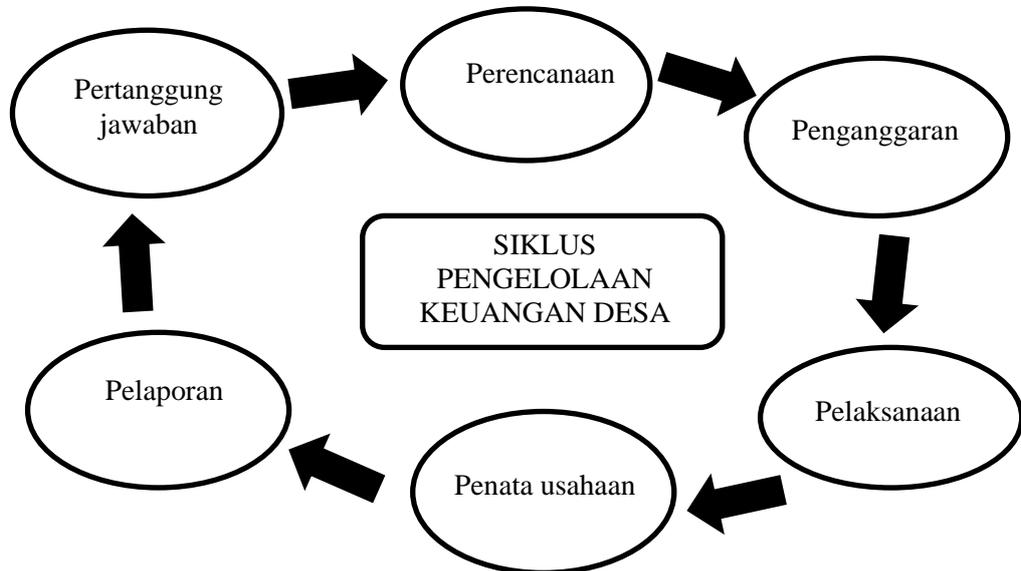
Dalam menyelenggarakan otonominya, desa harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap NKRI dengan menekankan bahwa desa merupakan bagian yang tidak akan bisa dipisahkan dari negara Indonesia.⁵¹

⁵¹ Misno, Manfaat Alokasi Dana Desa bagi Masyarakat Desa (Studi pada Desa Blangkahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat), *Perspektif*, Vol.8 No.2, Juli 2015, hal. 543-544.

f. Pengelolaan Keuangan Desa

Definisi keuangan desa berdasarkan UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Siklus dalam pengelolaan keuangan desa yaitu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tahap terakhir yaitu pertanggungjawaban, dengan periode 1 tahun anggaran yang terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Gambar 2.2
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Jungklak Bimkom Pengelolaan Keuangan Desa, dalam www.bpkp.go.id dikutip 2020

Setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut mempunyai aturan-aturan yang wajib untuk dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini, berikut adalah lima penelitian yang sudah pernah dilakukan:

Penelitian yang dilakukan oleh Batul⁵² pada tahun 2018 dengan judul Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen mempunyai tujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Penelitian yang dilakukan oleh Batul menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah bahwa efektivitas kebijakan dana desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dinilai tepat dimana dari 'lima tepat' yaitu tepat kebijakan (masyarakat Tegalrejo telah menerima dan menikmati manfaatnya yaitu akses lebih mudah), tepat pelaksanaan (pemerintah desa Tegalrejo telah melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat desa, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak swasta), tepat target (pembangunan yang dilakukan sesuai dengan target dalam APBDes), tepat lingkungan (koordinasi pemerintah desa dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan baik serta di lingkungan eksternal kebijakan

⁵² Batul, *Efektivitas Kebijakan Dana...*, hal. xiii-121

media massa telah memberikan informasi terkait dengan pembangunan yang dilakukan di Desa Tegalrejo), tepat proses (pemerintahan yang terkait yaitu pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, sampai pemerintah desa telah memahami dengan baik maksud dan tujuan kebijakan Dana Desa dimana kebijakan Dana Desa ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari kebijakan dari desa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama mengkaji dana desa dalam meningkatkan pembangunan yang ada di desa serta penggunaan metode yang sama dalam penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai lokasi penelitian dimana lokasi penelitian yang dilakukan oleh Batul berlokasi di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berlokasi di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Almira⁵³ pada tahun 2018 yang berjudul “Peran Dana Desa dalam Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung” mempunyai tujuan untuk mengetahui perencanaan pembangunan infrastruktur, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur, serta realisasi pembangunan infrastruktur di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pembangunan mengalami peningkatan dan mampu menunjang perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan anggaran Dana Desa yang membawa dampak kualitas

⁵³ Almira, *Peran Dana Desa...*, hal. xv-156

infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang ada secara optimal. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan di suatu desa yang mana penelitian sama-sama meneliti pembangunan infrastruktur sebagai penunjang perekonomian. Selain itu persamaan lainnya yaitu penggunaan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini adalah berkenaan dengan lokasi penelitian yang mana penelitian terdahulu berlokasi di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah berlokasi di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jamaluddin, *et all*⁵⁴ berjudul “Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah” pada tahun 2018 bertujuan untuk menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena desa memiliki kewenangan yang luas dalam hal menentukan rencana programnya sedangkan daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Dalam rangka

⁵⁴ Yanhar Jamaluddin, et all, Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol.6 No.1, 2018, hal. 14-23

mengintegrasikan program pembangunan desa yang sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah diperlukan *intervensi regulation* dari pemerintah daerah guna mengarahkan program desa yang mengacu pada kebijakan pembangunan daerah. Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Jamaluddin *et all* dengan penelitian saat ini yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan di suatu daerah. Selain itu persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan metode yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu mempunyai cakupan wilayah yang luas yaitu di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Sedangkan lokasi penelitian peneliti saat ini adalah di wilayah desa yaitu di Desa Kandangan Kabupaten Blitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik⁵⁵ pada tahun 2017 yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017)” bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Dana Desa di Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga tahun 2017 dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengelolaan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat belum bisa dilaksanakan dengan baik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan. Hal ini dikarenakan masih terdapat program

⁵⁵ Taufik. 2019. Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017). *Skripsi*. hal. 1-12

pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan sesuai dengan apa ditetapkan di awal. Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah sama-sama meneliti mengenai pengelolaan Dana Desa dan sama-sama berlokasi di satu desa saja. Selain itu persamaan lainnya adalah menggunakan metode yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pengelolaan dana desa dalam bidang yang berbeda, yakni peneliti terdahulu meneliti pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan desa peneliti saat ini meneliti pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan desa. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian yaitu penelitian terdahulu berlokasi di Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafid⁵⁶ pada tahun 2017 yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016” memiliki tujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam penggunaannya yang sesuai dengan program dan juga hasil-hasil dari pemanfaatan dana desa dalam keterlibatan masyarakat di Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep adalah efektif. Hal ini dapat

⁵⁶ Risma Hafid, Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016. *Skripsi*. 2017, hal. ii-60

terlihat dari jumlah program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa melalui MUSRENBAG. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dana desa di Desa Mangilu sudah cukup baik dimana masyarakat sudah terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada proses pelaksanaan program-program yang telah disusun. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hafid dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah sama-sama meneliti Dana Desa dalam kaitannya dengan pembangunan di sebuah desa. Selain itu persamaan lainnya adalah mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berlokasi di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Boedijono, Galih Wicaksono, et. al⁵⁷ dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso” mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa serta efektivitas pengelolaan dana desa guna pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan dari metode kuantitatif dan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah secara umum desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengelolaan keuangan

⁵⁷ Boediono, Galih Wicaksono, et.al, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, Vol.4 No.1, Februari 2019, hal. 9-20

desa secara baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Boedijono, Galih Wicaksono, et.al dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah tentang objek yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji dana desa. Sedangkan untuk perbedaannya adalah tentang metode penelitian yang digunakan dimana peneliti terdahulu menggunakan metode gabungan dari kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan lainnya yaitu berkenaan dengan lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian di tiga kecamatan yang berada di Kabupaten Bondowoso yaitu di Kecamatan Curahdami, Kecamatan Wonoasri, dan Kecamatan Tenggarang. Sedangkan peneliti saat ini hanya meneliti di satu desa saja yaitu di Desa Kandangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Alit dan Susi Handayani⁵⁸ yang berjudul “Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa” bertujuan untuk menjelaskan penerapan peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/2016 tentang pengelolaan keuangan dana desa. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kendala yang disebabkan oleh perubahan kementerian dan kemampuan penyalur dana desa yang masih belum

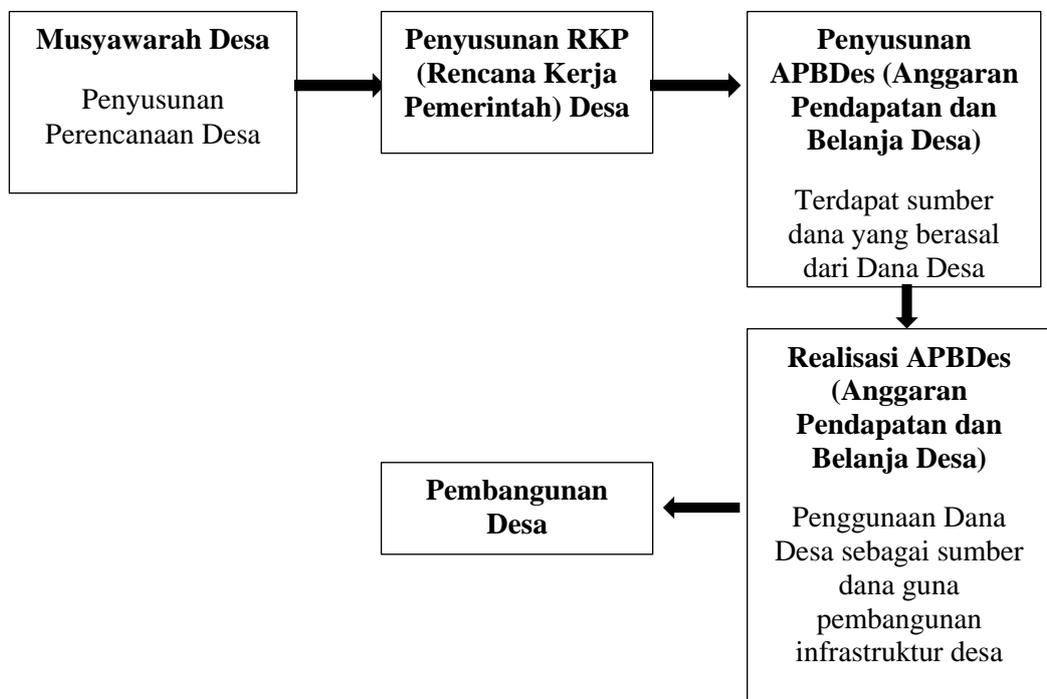
⁵⁸ Ni Nyoman Alit dan Susi Handayani, Praktik Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, Vol.9 No.1, April 2018, hal. 136-155

mumpuni. Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya penyaluran dana desa. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya adalah berhubungan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu dalam penelitian terdahulu menggunakan metode studi kasus, sedangkan metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan lainnya adalah terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu berlokasi di tiga desa yaitu Desa Plosogeneng, Desa Donowarih, dan Desa Pesantren. Sedangkan lokasi yang digunakan oleh peneliti saat ini adalah di Desa Kandangan yang berada di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

C. Kerangka Berpikir Teoritis

Kerangka berpikir merupakan serangkaian konsep hubungan yang dirumuskan oleh peneliti, dengan memeriksa teori yang disusun dari penelitian terdahulu.

Gambar 2.3
Pembangunan Desa Kandungan Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar



Sumber: Arsip data Desa Kandungan diolah kembali oleh peneliti, dikutip tahun 2020

Pengelolaan Dana Desa diawali dengan adanya musyawarah desa dalam rangka menyusun perencanaan desa di bulan Januari sampai dengan bulan Juni yang selanjutnya penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa yang mulai disusun pada bulan Juli yang selanjutnya adalah menyusun APBDes yang didalamnya terdapat sumber dana transfer Dana Desa yang mana Dana Desa ini adalah digunakan untuk pembangunan.